

**PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA TENAGA KERJA MIGRAN
DENGAN PEMILIK KEBUN MENURUT PERSFEKTIF EKONOMI
ISLAM**

(Studi Kasus Pada Petani Karet Di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Ekonomi Islam (S.EI) Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.**



Oleh:

NURREZKI EFNITA
10625003947

PROGRAM S1

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2011

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Pelaksanaan Kerjasama Antara Tenaga Kerja Migran Dengan Pemilik Kebun Menurut Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Kasus Pada Petani Karet Di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi).**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun karet di desa Muara Lembu, dan bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan(*Field Research*), yang berlokasi di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas pelaksanaan perjanjian kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun karet di desa Muara Lembu, dan untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi.

Untuk menjawab persoalan tersebut, maka terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data yang berkenaan dengan pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi.

Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan angket. Serta data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Setelah data tersebut terkumpul, maka langkah selanjutnya menganalisa data dengan analisa deskriptif kualitatif. Dengan metode analisa deduktif, induktif, dan deskriptif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam kerjasama yang dilakukan pemilik kebun di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi, sebelum mempekerjakan tenaga kerja migran kurang melakukan pengawasan. Sehingga tenaga kerja migran sebagai penggarap kebun karet yang tidak amanah menyerahkan kebun yang diserahkan pemilik kepadanya kepada tenaga kerja lain tanpa sepengetahuan dari pemilik kebun. Dengan cara seperti itu dapat merugikan pemilik kebun. Dan dalam pelaksanaan kerjasama yang dilakukan antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun karet di desa Muara Lembu yakni dalam perjanjian yang mereka lakukan tidak tertulis, sehingga banyak penyimpangan yang terjadi yakni terdapat kecurangan dalam pembagian hasil kebun, dan tidak adanya batas waktu dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama. Akibatnya kebun karet dapat diambil oleh pemiliknya kapanpun dia suka. Begitu juga dengan tenaga kerja migran dapat membatalkan kerjasama kapanpun dia suka.

Pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun karet di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasamanya menimbulkan unsur gharar (kesamaran). Idealnya pelaksanaan kerjasama dalam Islam yakni perjanjian hendaklah dibuat tertulis, dan mempunyai batas waktu. Dalam hal ini guna menghindari terjadinya penyimpangan dikemudian hari.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

NOTA PEMBIMBING

PERSEMBAHAN

MOTTO

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Metode Analisis Data.....	9
G. Sistematika Penulisan	10

BAB II GAMBARAN UMUM DESA MUARA LEMBU

A. Geografis Dan Demografis	12
B. Pendidikan Dan Kehidupan Beragama	14
C. Sosial Ekonomi Masyarakat	16
D. Adat Istiadat	18

E. Tenaga Kerja Migran di lingkungan Desa Muara Lembu	19
--	----

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA MIGRAN DAN MUSAQAH

A. Pengertian Tenaga Kerja Dan Migrasi.....	22
B. Perjanjian Hubungan Kerja.....	23
C. Pengertian Musaqah Dan Dasarnya	27
D. Rukun Musaqah	30
E. Syarat-Syarat Musaqah	31
F. Hukum Musaqah	33
G. Berakhirnya Musaqah	34

BAB IV PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA TENAGA KERJA MIGRAN DENGAN PEMILIK KEBUN DI DESA MUARA LEMBU

A. Pelaksanaan KerjaSama Antara Tenaga Kerja Migran Dengan Pemilik Kebun	36
B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Antara Tenaga Kerja Migran Dengan Pemilik Kebun Di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi.....	51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dan demokratisasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembangunan ekonomi pada umumnya adalah peningkatan pendapatan riil perkapita serta adanya unsur keadilan atau pemerataan dalam penghasilan dan kesempatan berusaha¹. Dengan mengetahui tujuan dan sasaran pembangunan, serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki suatu daerah, maka strategi tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah atau siapa saja yang akan melaksanakan kegiatan usaha di daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah mau tidak mau harus berfikir keras dalam menentukan potensi daerahnya yang dapat menjadi andalan dalam meningkatkan perekonomian. Hal ini disebabkan karena pengembangan sektor potensial merupakan salah satu cara dalam percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan sektor-sektor potensial diharapkan membawa dampak positif bagi perkembangan daerah, salah satunya yaitu dalam penyerapan tenaga kerja.

Angkatan kerja yang tumbuh sangat cepat tentu saja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian, yakni penciptaan atau perluasan lapangan kerja. Pertambahan jumlah angkatan kerja tanpa diikuti dengan pertambahan kesempatan berusaha, menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran, dan ini merupakan masalah bagi suatu daerah. Target-target pertumbuhan yang ingin dicapai harus mendukung perluasan lapangan usaha agar

¹ Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2003), h. 48.

tenaga kerja yang terus meningkat jumlahnya dapat terserap sehingga mengurangi jumlah pengangguran di suatu daerah².

Upaya pengentasan kemiskinan antara lain dengan melakukan perbaikan kondisi kesehatan serta peningkatan sumber daya manusia (SDM)³. Dalam upaya pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak sedikit kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi serta distribusi yang tidak merata. Keadaan ini menyebabkan pada satu daerah padat akan penduduk. Hal ini sudah barang tentu membawa konsekwensi secara positif dan negatif pada aktifitas ekonomi di daerah tersebut.

Salah satu konsekwensi yang timbul adalah munculnya perpindahan penduduk. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesempatan ekonomi yang akan dapat meningkatkan taraf hidup. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa seseorang akan melakukan mobilitas dengan tujuan untuk memperoleh pekerjaan atau pendapatan⁴. Dengan demikian, daerah tujuan mobilitas penduduk merupakan daerah dimana terdapat peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, atau peningkatan pendapatan. Sehingga kesempatan kerja yang tersedia disuatu daerah merupakan salah satu faktor penarik adanya mobilitas penduduk dan pada umumnya daerah yang maju lebih padat dari pada daerah sekitarnya.

migrasi merupakan salah satu aspek kependudukan yang penting karena berpengaruh terhadap keadaan sosial ekonomi pada daerah asal dan daerah tujuan asal yang meliputi

² *Ibid.* h. 120.

³ Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), h. 23.

⁴ Pollard, Farhap Yusuf, *Teknik Demografi*, (Jakarta : Bina Aksara, 1989), h. 221.

perubahan jumlah penduduk menurut golongan umur, tingkat pengangguran, pendidikan, pendapatan daerah, pasar tenaga kerja⁵.

Perpindahan penduduk mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Apabila terlalu banyak migran masuk pada suatu daerah dapat menyebabkan tingkat pengangguran bertambah di daerah tersebut. Faktor positif yang menarik orang masuk ke suatu daerah (migrasi masuk) untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang cocok, kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, kesempatan memperoleh keadaan lingkungan yang menyenangkan dibanding daerah asal dan karena alasan lain. Dengan kata lain, motif ekonomi merupakan dorongan utama orang untuk melakukan migrasi⁶.

Pada satu sisi adanya arus migran masuk merupakan pertanda telah berjalannya proses pertumbuhan daerah. Akan tetapi, disisi lain dapat menimbulkan permasalahan dan tantangan terhadap kegiatan pembangunan suatu daerah⁷.

Dengan adanya migran akan membawa dampak pada corak maupun kualitas dari daerah tujuan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari kualitas penduduk yang pindah. Ada perpindahan penduduk yang merupakan jenis orang-orang yang potensial, dimana mereka mempunyai pendidikan yang tinggi dan tenaga ahli, dan sebaliknya bagi mereka yang tidak potensial ikut pula mewarnai bentuk perpindahan tersebut.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumber daya alam dan hutan. Kabupaten ini terdiri dari 12 kecamatan, Salah satunya ialah kecamatan Singingi yang berpusat di desa Muara Lembu. Dimana usaha ekonomi masyarakat di desa ini

⁵ Siswono Yudhohusodo, *Transmigrasi*, (Jakarta : PT. Jurnalindo Aksara Grafika, 1998), h. 139.

⁶ Pollard, Farhap Yusuf, *op.cit.*, h. 224.

⁷ Rukmadi Warsito, dkk, *Transmigrasi Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 1.

mengandalkan dalam sektor perkebunan sebagai ujung tombak perekonomian terutama dalam perkebunan karet dan kelapa sawit. Selain itu, di sektor pertambangan kabupaten Kuantan Singingi juga mempunyai peluang besar untuk mengembangkan perekonomiannya apalagi daerah ini memperlihatkan perkembangan yang cukup baik serta memiliki kandungan batu bara yang sangat besar.

Masyarakat singingi dalam perekonomiannya mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan. Sehingga banyak masyarakat dari luar daerah sebagai migran yang datang untuk mencari pekerjaan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya, masyarakat Muara Lembu yang memiliki lahan pertanian atau perkebunan yang luas, maka merekapun membutuhkan tenaga kerja dalam merawat ataupun mengambil hasil kebun atau hasil pertanian. Dalam Ekonomi Islam sistem ini juga dinamakan dengan sistem musaqah⁸. Dimana sistem Musaqah itu adalah suatu akad (transaksi) antara pemilik kebun dan pekerja untuk memelihara atau menggarap hasil kebun ataupun pertanian supaya mendatangkan kemaslahatan, dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan, seperti sepertiga atau setengahnya dari hasil pertanian⁹.

Ekonomi dalam kajian keilmuan dapat dikelompokkan kedalam ekonomi mikro dan makro. Pada ekonomi mikro mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi, yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah ataupun perilaku dari sebuah industri.¹⁰

Kedudukan ekonomi penduduk asli biasanya lebih tinggi dari pada para migran, Kemakmuran ini berasal dari produksi tanaman perdagangan untuk pasaran dunia yaitu tanaman karet dan sawit. Bentuk produksi ini ternyata dapat meningkatkan pendapatan

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 145.

⁹ *Ibid* h. 146.

¹⁰ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 1.

masyarakat. Kedua tanaman ini adalah tanaman jangka panjang, sehingga muncullah suatu peluang usaha bagi tenaga kerja. Hal inilah yang menarik para migran untuk bekerja sama dengan pemilik kebun guna meningkatkan pendapatan ekonomi.

Inti mekanisme bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerja sama yang baik antara pemilik lahan dan petani. Kerja sama atau parthenship merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam.

Dari pengamatan penulis terhadap kerjasama usaha perkebunan, khususnya pada perkebunan karet di desa Muara lembu kecamatan Singingi, ditemukan sebagian pemilik kebun memberikan kebunnya, tanpa pengawasan langsung. Bagi pekerja yang tidak memiliki sifat amanah, dengan tidak adanya pengawasan tersebut, dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keuntungan sendiri. Kasus ini sering kali terjadi pada masyarakat Muara lembu, yang kebanyakan sebagai pekerjanya berasal dari luar daerah.

Berdasarkan fenomena yang ada, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Dan mengangkatnya dalam suatu karya ilmiah dengan judul "Pelaksanaan Kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun Menurut Perspektif Ekonomi Islam".

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan, waktu dan dana maka dalam penulisan ini hanya difokuskan pada : Bagaimana pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun karet menurut perspektif ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun karet di masyarakat Muara Lembu.
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun pada masyarakat Muara lembu.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi kita semua dengan sumbangan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan. Serta dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.
- b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun lokasi penelitian adalah di desa Muara Lembu kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah tenaga kerja migran dan pemilik kebun.

Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dan pemilik kebun karet.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah pemilik kebun karet dan tenaga kerja migran yang ada di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi dimana pada saat penelitian terdapat 30 kepala keluarga yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama dengan tenaga kerja migran dalam bidang perkebunan karet. Dan dengan jumlah tenaga kerja migran yang melaksanakan kerjasama perkebunan karet sebanyak 20 orang. Dikarenakan kuantitasnya terjangkau, maka penelitian ini menggunakan teknik total sampling. Dalam hal ini semua populasi dijadikan sampel penelitian.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau sumber data di lapangan yakni yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kerjasama tersebut.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bacaan literatur serta data penunjang lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan tenaga kerja migran dan pemilik kebun yang ada di desa Muara lembu.
- c. Angket yaitu dengan menyebarkan daftar pertanyaan sekitar penelitian ini kemudian disebar untuk di isi oleh para tenaga kerja dan pemilik kebun untuk memperkuat hasil penelitian.

6. Analisis Data

Dalam penelitian penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah diperoleh serta membahasnya, lalu dilakukan penganalisaan, kemudian digambarkan dengan kata-kata serta membuat sebuah kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil pembahasan.

F. Metode Analisa Data

- a. Metode Deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif adalah dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah sedikitpun.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Terdiri dari terdiri dari latar belakang, batasan masalah, Rumusan Masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II Gambaran Umum lokasi Penelitian

Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang memuat pembahasan tentang geografis dan demografis, pendidikan dan kehidupan beragama, sosial ekonomi dan adat istiadat masyarakat Muara Lembu kecamatan singingi.

BAB III: Tinjauan Perpustakaan

Dalam bab ini akan dijelaskan yang berkaitan dengan pengertian tenaga kerja dan migrasi, pengertian musaqah, dan dasarnya, syarat-syarat musaqah, rukun musaqah, hukum musaqah, serta berakhirnya musaqah.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi tentang pelaksanaan kerja sama antara tenaga kerja migran dan pemilik kebun menurut perspektif ekonomi Islam .

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang mungkin berguna bagi masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA MUARA LEMBU

A. Geografis dan Demografis

Daerah yang menjadi lokasi penelitian terletak di Kabupaten Kuantan Singingi yakni di Kecamatan Singingi desa Muara Lembu.

Muara Lembu merupakan suatu nama yang diambil dari salah satu nama sungai yang ada di Kecamatan Singingi. Disebut desa Muara Lembu karena dahulunya di desa ini terdapat rumput-rumput hijau di sepanjang aliran sungai yang ada di desa ini. Sehingga masyarakat yang mempunyai ternak seperti kerbau dan sapi, mereka akan membawa ternaknya ketepi sungai yang ditumbuhi rumput-rumput hijau yang subur dan membiarkan ternaknya makan secara bebas tanpa digembala. Bahkan masyarakat yang mempunyai sapi atau kerbau, ada yang membuat kandang di sepanjang tepi Sungai Lembu. Sehingga masyarakat setempat, tokoh adat, dan ulama mengambil dari nama rumput hijau yang tumbuh disepanjang aliran Sungai. Dan Sungai itu diberi nama Sungai Lembu. Sehingga nama desa ini diberi nama desa Muara Lembu.

Menurut data statistik kantor Lurah, Muara Lembu luasnya 6054 Ha, yang terdiri dari lahan pertanian, perkebunan, dan tanah perumahan. Dimana wilayah ini berada disepanjang jalan raya Teluk Kuantan-Pekanbaru. Adapun batas-batas desa Muara Lembu adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Kebun Lado.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Logas.

3. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Pulau Padang
4. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Sungai Bawang.

Berdasarkan data yang ada di kantor Lurah, bahwa penduduk yang bermukim di Desa Muara Lembu adalah berjumlah 4106 jiwa, yang terdiri dari 1583 Kepala Keluarga.

Untuk mengetahui jumlah penduduk secara terperinci akan dijelaskan dalam tabel berikut ini :

TABEL II. 1

KLASIFIKASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Laki-laki	2091	50,92%
2	Perempuan	2015	49,08%
	JUMLAH	4106	100%

Sumber Statistik Kantor Lurah Muara Lembu Th. 2010

Berdasarkan tabel di atas, sangat jelas bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

TABEL II. 2

**KLASIFIKASI PERKEMBANGAN JUMLAH KEPALA
KELUARGA DI DESA MUARA LEMBU**

No	PERKEMBANGAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA
1	Kepala keluarga tahunl lalu	978
2	Kepala keluarga tahunl sekarang	1583

Sumber : Statistik kantor Lurah Muara Lembu Th. 2010

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah kepala keluarga dari tahun lalu dibandingkan dengan tahun sekarang mengalami

banyak peningkatan. Hal ini juga berdasarkan pengaruh dari banyaknya penduduk yang datang dan menetap di Kelurahan Muara Lembu.

Dilihat dari orbitasi, waktu tempuh dan letak desa Muara Lembu ini adalah sebagaiberikut:

1. Jarak ke Ibukota Kabupaten 30 km.
2. Jarak ke Ibukota Propinsi 135 km.
3. Waktu tempuh ke Kota Kabupaten 30 menit.
4. Waktu tempuh ke Ibukota Propinsi 180 menit.

Desa Muara Lembu kecamatan Singingi termasuk daerah beriklim tropis, bentuk daerah terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi.

B. Pendidikan dan Kehidupan Beragama

Bidang pendidikan merupakan indikator untuk mengukur tingkat perkembangan masyarakat di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan sarana pendidikan dan anak didik yang ingin melanjutkan studinya ketingkat yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL II. 3
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI DESA MUARA LEMBU
KECAMATAN SINGINGI TAHUN 2010-2011

NO	JENIS PENDIDIKAN	NEGERI	SWASTA	JUMLAH
1	Play grup	-	1	1
1.	TK	-	1	1
2.	SD	2	-	2
3.	MI	-	1	1
4.	MDA	-	1	1
5.	SLTP	1	-	1
6.	MTS	-	1	1
7.	SLTA	1	-	1
	JUMLAH	4	5	9

Sumber : Statistik Kantor Lurah Muara Lembu Th. 2010

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat diabaikan, maju mundurnya suatu daerah dipengaruhi oleh pendidikan masyarakat itu sendiri, karena pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia.

Dalam kehidupan beragama masyarakat di Desa Muara Lembu mayoritas beragama Islam. Dimana terdapat beberapa tempat ibadah dan kegiatan keagamaan seperti wirid pengajian yang dilakukan oleh para ibu-ibu setiap minggunya, yakni dilaksanakan pada setiap hari jum'at. Mesjid dan mushalla ini juga dijadikan untuk kegiatan belajar mengajar ngaji pada malam harinya oleh anak-anak yang ada di setiap RK (Rukun Warga) setempat. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL II. 4**JUMLAH TEMPAT IBADAH DI DESA MUARA LEMBU**

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	Mesjid	2
2	Mushalla	8
3	Gereja	-
	JUMLAH	10

Sumber : Data Statistik Kantor Lurah Muara Lembu Th. 2010

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah mesjid lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan jumlah mushalla. Jumlah mesjid yang ada hanya 2 buah, sedangkan jumlah Mushallanya ada 8 buah. Semua ini karena desa ini mempunyai 8 buah RK (Rukun Warga) dimana setiap RK mempunyai satu Mushalla.

C. Sosial Ekonomi Masyarakat**1. Sosial**

Sebagai interaksi sosial kemasyarakatan, di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi cukup dinamis. Adapun mengenai rasa sosial ini Suerjono soekonto mengatakan :

- a. Seperasaan.Yaitu seseorang berusaha untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin kedalam suatu kelompok tertentu sehingga dirinya merupakan bagian dari kelompok tersebut, segala keperluannya diselaraskan dengan keperluan kelompoknya sebagai struktur sosial.
- b. Saling memerlukan. Yaitu mereka mempunyai ikatan antara satu individu lainnya, sehingga terciptalah kerjasama yang baik antara kelompok kerja tersebut.

- c. Sepenanggungan. Yaitu apapun yang terjadi dalam masyarakat tersebut mereka merasa dalam kelompok sehingga mereka merasa berada dalam kedudukan yang pasti¹.

Masyarakat Muara Lembu, tergolong masyarakat yang mempunyai rasa sosial yang tinggi. Rasa sosial terbentuk antara satu sama lain saling memerlukan dan juga seperasaan, senasib dan sepenanggungan yang terlihat dengan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seperti bergotong royong, bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada, dan lain sebagainya.

2. Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi melakukan berbagai macam usaha. Sebagai mata pencarian utamanya adalah sebagai petani, pedagang, PNS, pertenakan, wiraswasta dan pengrajin.

Perbandingan tingkat mata pencarian di Desa Muara Lembu, Kecamatan Singingi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini :

Suerjono Soekonto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Wali Press, 1986), h.50.

TABEL II. 5
PERBANDINGAN JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA
PENCAHARIAN

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Petani	485 jiwa	43,85%
2	Pegawai Negeri	265 jiwa	23,96%
3	Wiraswasta	164 jiwa	14,82%
4	Peternak	120 jiwa	10,87%
5	Pedagang	10 jiwa	0,90%
6	Pengrajin	10 jiwa	0,90%
	JUMLAH	1106 jiwa	100%

Sumber : Statistik Kantor Lurah Muara Lembu Th. 2010

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa penduduk Muara Lembu kecamatan Singingi mayoritas bekerja sebagai petani. Karena merupakan mata pencaharian utama penduduk terbesar yaitu sebagai petani karet. Luas lahan perkebunan sekitar 1800 Ha. Perkebunan yang mereka tanam, seperti : karet dan kelapa sawit. Kemudian disusul pegawai Negeri Sipil sebagai mata pencarian masyarakat terbesar yang kedua Menurut data statistik Kantor Lurah Muara Lembu berjumlah 265 jiwa dan sebagai Wiraswasta yang mata pencaharian terbanyak ketiga yaitu yang berjumlah 164 jiwa, serta berbagai macam mata pencaharian lainnya.

D. Adat Istiadat

Dalam kehidupan adat-istiadat, Masyarakat Muara Lembu Kecamatan Singingi di dominasi oleh suku Melayu. Karena dahulunya penyebaran Islam ke daerah ini dibawa oleh bangsa Arab dan Malaysia. Dimana adat istiadat di daerah ini merupakan suatu peraturan yang tidak boleh di langgar. Sehingga

Masyarakat di desa ini sangat patuh terhadap peraturan adat yang berlaku. Di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi terdapat berbagai nama suku yang ada yakni : suku Melayu Datuk Jalo Sutan, suku Melayu datuk Mangkuto Sanaro, suku Bendang, suku Piabadar, suku Peliang Ateh dan suku Peliang Bawah. Dimana setiap suku di pimpin oleh satu kepala suku dari masing-masing suku yang ada yang disebut dengan Niniak Mamak Suku. Dan setiap tahunnya, masing-masing suku biasanya mengadakan syukuran, dan ziarah kubur. Yakni pada hari ke tiga dari hari raya Idul Fitri, yang dilaksanakan bergiliran dari setiap suku yang ada. Maka dalam hal ini bagi pendatang dari daerah lain yang ingin menetap sementara maupun selamanya, wajib masuk suku sesuai dengan ketentuan dan peraturan adat yang berlaku di Desa Muara Lembu kecamatan Singingi.

E. Tenaga Kerja Migran Di Lingkungan Desa Muara Lembu.

Berdasarkan data dari kantor lurah Muara Lembu, jumlah penduduk yang berasal dari daerah lain sebagai migran di lingkungan desa Muara Lembu Kecamatan Singingi yakni berasal dari berbagai macam daerah asal. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL II. 6
JUMLAH PENDUDUK MIGRAN DI DESA MUARA LEMBU
KECAMATAN SINGINGI

NO	DAERAH ASAL	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Jawa	40	28,58 %
2.	Sulawesi	10	7,14 %
3.	Palembang	17	12,14 %
4.	Lampung	8	5,71 %
5.	Jambi	14	10 %
6.	Medan (Nias)	51	36,42 %
	JUMLAH	140	100 %

Sumber: Statistik Kantor Lurah Muara Lembu Th. 2010

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk migran yang ada di lingkungan desa Muara Lembu yakni berasal dari daerah Jawa, Sulawesi, Palembang, Lampung, Jambi, dan daerah Medan khususnya dari suku Nias.

Luasnya lahan perkebunan masyarakat Muara Lembu Kecamatan Singingi khususnya pada perkebunan karet, menjadi suatu dorongan penduduk yang berasal dari daerah lain untuk melakukan migrasi ke desa ini. Luasnya kebun karet yang dimiliki masyarakat Muara Lembu membutuhkan tenaga kerja dalam menggarap dan merawat kebunnya tersebut. Sehingga muncullah suatu peluang pekerjaan bagi masyarakat pendatang. Untuk mengetahui jumlah tenaga kerja migran di desa Muara Lembu dapat diketahui pada tabel sebagai berikut:

TABEL II. 7
KLASIFIKASI JUMLAH TENAGA KERJA MIGRAN DI DESA
MUARA LEMBU KECAMATAN SINGINGI

NO	JENIS PERKEBUNAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Karet	50	59, 3 %
2.	Sawit	34	40, 47 %
	JUMLAH	84	100 %

Sumber: Kantor Lurah Muara Lembu Th. 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja migran yang ada di lingkungan desa Muara Lembu lebih banyak pada perkebunan karet yakni berjumlah 50 atau (59,3 %), sedangkan jumlah tenaga kerja migran pada perkebunan sawit berjumlah 34 atau (40,47 %).

Demikianlah gambaran umum dari desa Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA

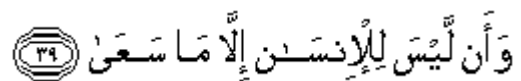
MIGRAN DAN MUSAQAH

A. Pengertian Tenaga Kerja dan Migrasi

1. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh¹.

Kitab suci Al-qur'an memandang betapa pentingnya produksi kekayaan Negara, Al-qur'an telah memberi penekanan yang lebih terhadap tenaga manusia. Ini dapat dilihat dari petikan ayat dalam surat An-Najm²:



Artinya: Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (An-Najm: 39)

Diriwayatkan dalam ayat tersebut bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan sesuatu dari alam ini ialah melalui kerja keras. Kemajuan dan

¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf), jilid 1, h 248.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Karya Insani Indonesia, 2002), Cet Ke-4

kekayaan manusia dari alam ini tergantung pada usaha. Semakin bersungguh-sungguh dia bekerja semakin banyak harta yang diperolehnya.

Dalam surat Al- Anfaal Allah berfirman:



Artinya: Demikian itu karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah di anugerahkan kepada sesuatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui. (Al-Anfaal : 53)³.

Al-qur'an memberi penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk mencari penghidupan masing-masing.

B. Perjanjian Hubungan Kerja

Perjanjian kerja sering di istilahkan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan, dan lazim juga digunakan istilah perjanjian perburuhan. Secara umum, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut⁴. Dalam hal perjanjian kerja atau perburuhan merupakan perjanjian yang diadakan antara pihak pekerja (buruh) dengan pihak yang memberikan pekerjaan. Lazimnya pekerja memberikan perintah dan yang melakukan pekerjaan harus menaati perintah tersebut. Perjanjian kerja

³ Ibid.

⁴ Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT. Sinar Grafika, 2000), Cet Ke-2.

dalam Islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (al-ijarah), yaitu ijarah a'yan, sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan⁵.

Hubungan kerja kan melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Adapun yang menjadi kewajiban pekerja dengan adanya hubungan kerja yaitu⁶:

1. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan.
2. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
3. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti.
4. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan untuk dikerjakan.

Dalam kriteria pemilihan tenaga kerja bergantung pada tiga faktor yaitu:

1. Kecakapan tenaga kerja

Kecakapan tenaga kerja adalah usaha tenaga kerja untuk bekerja dan mampu meningkatkan hasil ataupun modal.

Islam menjunjung tinggi hasil kerja yang cakup dan memerintahkan umat Islam mengajarkan semua jenis kerja dengan tekun dan sempurna. Kesehatan moral dan fisik juga mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kecakapan tenaga kerja atau buruh. Tenaga kerja yang sehat dan kuat lebih cakap dari pada buruh yang lemah dan sakit. Begitu juga dengan seorang pekerja yang jujur dan bertanggung jawab, yang menyadari tugas dan tanggung jawabnya akan bekerja lebih kuat dan tekun, dan orang yang

⁵ *Ibid.* 152.

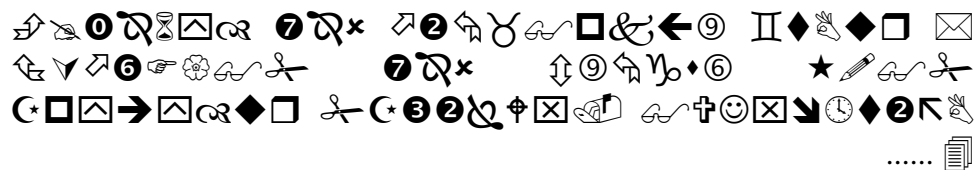
⁶ *Ibid.* 154.

tidak kuat dan tidak jujur tidak akan merasa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.

2. Mobilisasi tenaga kerja

Mobilisasi tenaga kerja ialah gerakan tenaga kerja dari suatu kawasan geografi dan kawasan lain. Mobilisasi tenaga kerja mempunyai hubungan yang erat dengan kedudukan ekonomi para pekerja. Jika golongan tenaga kerja boleh bergerak dengan mudah dan bebas dari satu tempat ketempat yang lain, dimana mereka boleh memperoleh upah dari pekerjaannya.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat: 100 yang berbunyi:



Artinya: Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, niscaya akan diperolehnya

dibumi tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. (An-Nisaa':100)⁷.

Menurut Al-qur'an mobilisasi tenaga kerja adalah kaidah yang sangat tepat untuk menyelesaikan banyak masalah ekonomi dan sosial politik pada zaman ini⁸.

3. Penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penawaran tenaga kerja atau buruh di suatu Negara.

⁷ Ibid.

⁸ Afzalur Rahman, *op. cit.*, h. 271.

2. Pengertian Migrasi

Migrasi yaitu perpindahan yang terjadi dalam satu Negara, misalnya antar propinsi, antar kota/ kabupaten, migrasi pedesaan ke perkotaan, atau satuan administratif lainnya yang lebih rendah dari pada tingkat kabupaten, seperti kecamatan, kelurahan dan seterusnya. Jenis migrasi yang terjadi antar unit administratif selama masih dalam satu Negara.

Menurut Everetss Lee, migrasi ialah perubahan tempat tinggal secara permanen tidak untuk sementara waktu. Jadi tidak tepat jika di identikkan merantau yang lebih bersifat temporer, apabila di daerah atau negeri tujuan perantauan sudah berhasil memperoleh apa yang dicita-citakan, biasanya kembali ke daerah atau negeri semula⁹.

Dalam hal ini orang yang melakukan migrasi disebut dengan migran¹⁰.

Jenis-jenis migrasi yaitu:

1. Digunakan batasan waktu untuk migran, artinya seseorang dikatakan migran, jika dia tinggal ditempat yang baru atau berniat tinggal di tempat yang baru itu paling sedikit 6 bulan lamanya.
2. Migrasi Sirkuler atau migrasi musiman, yakni migrasi yang terjadi jika seseorang berpindah tempat tetapi tidak bermaksud menetap ditempat tujuan.

⁹ Everetss Lee, *Suatu Teori Migrasi, Terj*, (Yogyakarta: Lembaga Kependudukan UGM, 1976), h. 5.

¹⁰ Andi Ima Kesuma, *Migrasi dan Orang Bugis*, (Yogyakarta: Ombak, 2004). h. 8.

3. Migrasi Ulang Alik (*commuter*) yakni orang yang setiap hari meninggalkan tempat tinggalnya pergi ke kota lain untuk bekerja atau berdagang dan sebagainya tetapi pulang pada sore harinya.

Hal-hal yang mendorong seseorang atau kelompok masyarakat untuk bermigrasi diantaranya yaitu¹¹:

1. Karena alasan pendorong. Misalnya alasan ekonomis, politis, dan agama.
2. Adanya kemungkinan perpindahan. Misalnya karena bencana alam yang membinasakan habitasi penduduk di suatu negeri, sehingga tidak memberi kemungkinan lagi untuk bermukim ditempat itu.

C. Pengertian Musaqah Dan Dasarnya

1. Pengertian Musaqah

Musaqah adalah suatu akad (transaksi) antara pemilik kebun dan pekerja untuk memelihara atau menggarap hasil kebun ataupun pertanian supaya mendatangkan kemaslahatan, dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan, seperti sepertiga atau setengahnya dari hasil pertanian¹².

Para ulama fiqh mendefenisikan musaqah yaitu akad penyerahan kebun(pohon-pohon) kepada petani untuk digarap dengan ketentuan bahwa hasilnya dimiliki berdua, antara pemilik dengan petani.

Dalam buku yang berjudul Kitab Al- Musaqah Ringkasan Sahih Bukhari, pengertian musaqah adalah akad antara pemilik kebun dengan

¹¹ Ibid. 10.

¹² Hendi Suhendi, *loc. cit.*

pekerja bahwa sipekerja akan menyirami atau merawat kebunnya, dengan adanya pembagian hasil diantara mereka sesuai kesepakatan perjanjian.

Secara sederhana musaqah diartikan dengan kerjasama dalam perawatan ataupun dalam penggarapan tanaman, dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut¹³. Yang dimaksud dengan "tanaman" dalam muamalah ini adalah tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya seperti kelapa sawit, atau yang bergetah untuk mengharapkan getahnya, bukan tanaman tua yang mengharapkan kayunya¹⁴.

Kerjasama dalam bentuk musaqat ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. menurut kebanyakan ulama hukum dari musaqat ini adalah boleh atau mubah.

2. Dasar Hukum Musaqah

Ulama fiqih sepakat bahwa tanaman yang diakadkan dalam musaqah adalah tanaman yang usianya minimal satu tahun. Juga disyaratkan bahwa jenis tanaman itu adalah tanaman keras. Sebagai dasarnya adalah hadits Rasulullah yang berbunyi:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما :

عامل اهل خيبر بشطرا ما يخرج منها من ثمر او زرع.

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet. Ke-2, h.243.

¹⁴ *Ibid.*

Artinya : "Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan, maupun dari hasil tanaman yang dikerjakan". (HR. Muslim)¹⁵.

Dasar hukum bolehnya Musaqah adalah umumnya hadits Nabi yang mempekerjakan penduduk Khaibar yang disebutkan di atas, dalam kerjasama pertanian.

Dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa seorang Ansor pernah mengusulkan kepada Rasulullah agar para Muhajirin mendapat sebagian dari kebun Kurma mereka. Nabi menjawab: "Saya tidak membolehkan", kemudian di usulkan lagi agar kaum Muhajirin mengelolanya dan hasilnya dibagi bersama¹⁶.

Dari beberapa hadits tersebut dapat dipahami, bahwa Rasulullah tidak membenarkan kebun orang Ansor itu diberikan kepada orang Muhajirin dengan Cuma-Cuma. Nabi membenarkan mereka mengelola dan memanfaatkan hasil dari jerih payah mereka¹⁷.

Hadits tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه : قالت الانصار للنبي صلى الله عليه
: اقسم يننا وبيننا وبين اخواننا النخل,
() :

Artinya: Dari Abi Hurairah Ra: Orang Anshar berkata kepada Nabi SAW: berbagilah untuk pohon kurma itu antara kita dan saudara-saudara

¹⁵ Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq'Alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. Ke-1, h.103.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), Cet-2, h. 281.

¹⁷ M. Nashiruddin Al-albani, *Kitab Al-Musaqah Ringkasan Sahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), cet. 1.

kita, Rasul Menjawab: jangan kita cukup mengerjakannya dan membagi buah hasilnya orang Anshar menjawab: kami dengar dan taati. (HR. Bukhari).

Disamping hadits tersebut diatas, diperkuat oleh ijma' ulama karena kerjasama seperti itu amat diperlukan.

D. Rukun Musaqah

Ulama Mazhab Hanafi menyatakan, bahwa rukun Musaqah hanya dua saja, yaitu Ijab dan Kabul (penyerahan dan penerimaan)¹⁸.

Jumhur Ulama (mazhab Maliki, Syafi'I, dan Hanbali) menyatakan rukun musaqah ada lima yaitu:

1. Ada dua orang (pihak) yang mengadakan akad (transaksi).

Pihak yang melakukan akad kerjasama ini adalah pemilik kebun dengan tenaga kerja migran. yang Masing-masing pihak melakukan akad perjanjian kerjasama.

2. Ada lahan yang dijadikan objek dalam perjanjian.

Lahan yang dijadikan objek perjanjian kerjasama antara tenaga kerja migran yakni dalam bentuk kerjasama di bidang perkebunan karet.

3. Bentuk / jenis usaha yang akan dilakukan.

Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Kejelasan manfaat pekerjaan dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.

4. Ada ketentuan bagian masing-masing dari hasil kerjasama itu.

¹⁸ *Ibid.* 282.

Pembagian hasil pada kerjasama dilakukan setelah penjualan hasil kebun yang masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian dari hasil kebun.

5. Ada perjanjian, baik tertulis maupun lisan (sighthah).

Perjanjian kerjasama dapat dilakukan tertulis, maupun lisan. Akan tetapi dalam melaksanakan akad perjanjian kerjasama hendaknya dilakukan tertulis, dalam hal ini akan dapat memudahkan masing-masing pihak yang melakukan akad kerjasama tersebut guna menghindari resiko yang kemungkinan terjadi dikemudian hari.

E. Syarat –Syarat Musaqah

Adapun syarat-syarat musaqah yaitu:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum(baligh dan berakal).

Pihak tenaga kerja migran dan pemilik kebun dalam pelaksanaan kerjasama adalah orang yang sudah dewasa yang sanggup melaksanakan kerjasama sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Benda yang dijadikan objek perjanjian bersifat pasti.

Tanaman yang dijadikan objek dalam perjanjian kerjasama harus diketahui pasti. Pekerjaan-pekerjaan yang haram menurut ketentuan syari'at tidak dapat menjadi objek perjanjian kerja.

3. Sesuatu yang dihasilkan dari kebun tersebut merupakan hak kerjasama dan pembagiannya juga sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

4. Bentuk usaha yang dilakukan oleh pengelola harus ada kaitannya dengan usaha untuk mengelola dan merawat kebun tersebut, agar memperoleh hasil yang maksimal. Dengan demikian akan menguntungkan kedua belah pihak.
5. Ada kesediaan masing-masing pihak untuk melakukan perjanjian tertulis atau lisan.

Kedua belah pihak sepakat menentukan bentuk perjanjian yang akan dilakukan. Dalam hal ini perjanjian kerjasama yang dilakukan antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun merupakan perjanjian tidak tertulis. Sehingga adanya penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama. Selanjutnya syarat-syarat benda yang akan di akadkan adalah:

- a. Tanaman yang dijadikan objek perjanjian itu harus diketahui secara pasti dan disebutkan dalam perjanjian.
- b. Lama perjanjian itu harus jelas.
- c. Ada ketentuan yang pasti tentang pembagian pengelola. Persentasenya harus jelas untuk masing-masing pihak. Dengan demikian tidak sah akad itu, apabila mencantumkan bagian pengelola saja atau pemilik lahan (kebun).

F. Hukum Musaqah

Musaqah hukumnya boleh. Adapun dasar hukum kebolehan nya adalah perbuatan Rasulullah dan Khulafa Rasyidin setelahnya. Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Ibnu Umar bahwa Nabi SAW menyuruh

penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan upah separuh dari yang dihasilkan dari lahan itu¹⁹.

Apabila penggarap tidak mampu bekerja keras karena sakit atau bepergian yang mendesak, maka musaqah menjadi fasakh(batal). Apabila dalam akad musaqah disyaratkan bahwa penggarap harus menggarap secara langsung(tidak diwakilkan), jika tidak disyaratkan demikian, maka musaqah tidak menjadi batal, tetapi penggarap diwajibkan untuk mendapatkan penggantinya selama ia berhalangan itu. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi.

Dalam keadaan penggarap tidak mampu menggarap tugasnya, sedangkan penjualan hasil kebun sudah waktunya, menurut Imam Malik, penggarap berkewajiban menyewa orang lain untuk menggantikan tugasnya, orang kedua ini tidak memperoleh bagian yang dihasilkan dari musaqah. Karena orang kedua dibayar oleh Musaqi(penggarap) sesuai dengan perjanjian. Sedangkan Imam Syafi'I berpendapat bahwa musaqah batal apabila pengelola tidak lagi mampu bekerja untuk mengurus kebun yang ada, sebab penggarap telah kehilangan kemampuan untuk menggarapnya.

G. Berakhirnya Musaqah

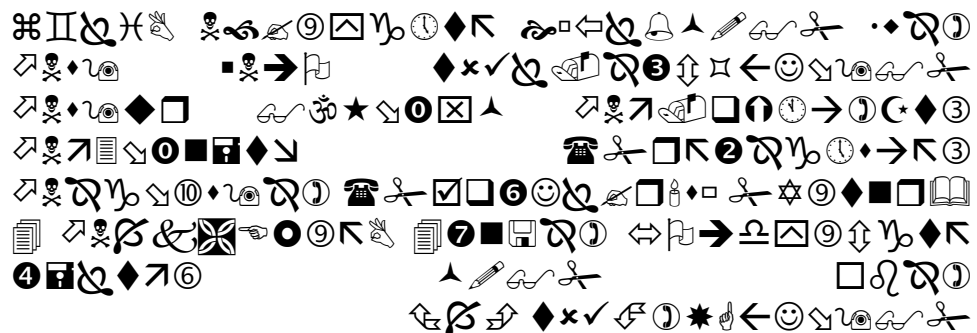
Musaqah dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir.

¹⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2006).

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu, apabila telah sampai kepada waktu yang diperjanjikan secara otomatis musaqah dapat berakhir.

Dasar hukum musaqah tentang hal ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 4, yang berbunyi:



Artinya : Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu Telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.²⁰

2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan dalam kerjasama, maka dalam hal ini musaqah dari kedua belah pihak dapat berakhir.

3. Jika ada kelancangan dari bukti penghianatan(penipuan)²¹.

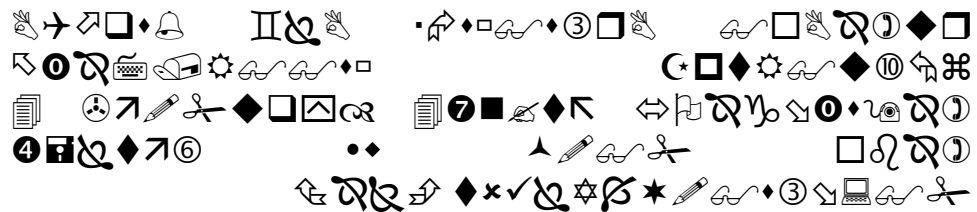
Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghianatan terhadap apa

²⁰ Depag RI. *Op. cit.*, h.

²¹ H. Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet ke -4, h.32.

yang telah di perjanjikan dalam kerjasama. Dalam hal ini kerjasama musaqah dapat berakhir dari salah satu pihak.

Sesuai firman Allah dalam Surat Al-Anfal ayat 58 yang berbunyi:



Artinya: “ Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) ada pengkhianatan dari

suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur”. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”²².

4. Jika penggarap melarikan diri, maka pemilik tanah berhak membatalkan musaqah.
5. Jika penggarap meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak menunjuk seseorang untuk menggantikan tugas mereka, tetapi jika keduanya sepakat membatalkannya, maka musaqah pun dianggap batal.

²² Depag RI. *Op., cit.*

BAB IV

PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA TENAGA KERJA MIGRAN DENGAN PEMILIK KEBUN DI DESA MUARA LEMBU

A. Pelaksanaan Kerjasama Antara Tenaga Kerja migran Dengan Pemilik Kebun

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 12 Kecamatan yang salah satunya adalah Kecamatan Singingi yang berpusat di desa Muara Lembu. Mayoritas penduduk di desa ini bermata pencaharian sebagai petani karet. Selain penduduk asli, desa ini juga merupakan desa yang banyak terdapat penduduk yang berasal dari daerah lain sebagai pendatang seperti dari daerah Jawa, Sulawesi, Palembang, Lampung, Jambi, Medan (dari suku Nias), dan Sumatra Barat.

Khusus dalam bidang perkebunan karet, umumnya masyarakat pendatang, banyak yang menjadi tenaga kerja dalam bentuk kerjasama dengan pemilik kebun karet. Dalam hal ini tenaga kerja sebagai penggarap kebun, sedangkan pemilik kebun memberikan kebunnya untuk digarap dengan kesepakatan pada waktu akad. Untuk mengetahui permasalahan ini, penulis menyusun angket yang disebarakan kepada responden (tenaga kerja migran dengan pemilik kebun) dengan maksud untuk melihat pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun karet di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi. Untuk mengetahui jumlah kebun karet yang dimiliki pemilik kebun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL IV. 1

JAWABAN PEMILIK KEBUN TENTANG JUMLAH KEBUN KARET YANG DI 36 I DI DESA MUARA LEMBU

KECAMATAN SINGINGI

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A	1-4 hektar	4	13,3 %
B	4-8 hektar	9	30 %
C	Lebih dari 8 hektar	17	56,7 %
	JUMLAH	30	100 %

Sumber Data : *Olahan Angket*

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa 4 atau (13,3 %) responden yang memiliki 1-4 hektar kebun. Selanjutnya 9 atau (30%) responden yang memiliki 4-8 hektar kebun. Kemudian 17 atau (56,7%) responden yang memiliki kebun lebih dari 8 hektar kebun karet.

Dalam pelaksanaan kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yang melakukan perikatan perjanjian, penulis akan menjelaskan bahwa dalam kerjasama tersebut, pemilik kebun dengan tenaga kerja migran (pendatang), perjanjian yang mereka buat adalah perjanjian tidak tertulis, artinya kebun karet diserahkan atas dasar kepercayaan begitu saja kepada penggarap. Sedangkan tenaga kerja untuk menggarap kebun karet adalah masyarakat dari daerah lain, sehingga pemilik kebun seharusnya perlu mengenal tenaga kerja tersebut sebelum dipekerjakan. Untuk mengetahui penentuan dalam pengawasan sebelum mempekerjakan tenaga kerja migran, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL IV. 2

**PENDAPAT PEMILIK KEBUN TENTANG PENGAWASAN
DALAM PENENTUAN UNTUK MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA MIGRAN**

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A	Ya	5	16.6 %
B	Kurang	17	56.7%

C	Tidak	8	26.7%
	JUMLAH	30	100 %

Sumber Data : *Olahan Angket*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa sedikitnya pemilik kebun karet yang menyerahkan kebunnya tanpa pengawasan terlebih dahulu. Umumnya 5 atau (10%) saja yang melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja migran. Sedangkan 35 atau (70%) kurang pengawasan, dan 10 atau (20%) bahkan tidak melakukan pengawasan dalam penentuan untuk mempekerjakan tenaga kerja migran oleh pihak pemilik kebun.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun membuat suatu kesepakatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL IV. 3

**JAWABAN RESPONDEN TENTANG PEMBUATAN KESEPAKATAN SEBELUM
KEBUN BERADA DIPIHAK TENAGA KERJA MIGRAN**

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A	Ya	50	100 %
B	Tidak	-	-
C	Kadang-kadang	-	-
	JUMLAH	50	100 %

Sumber Data : *Olahan Angket*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa 50 atau (100%) responden yang membuat suatu perjanjian sebelum kebun tersebut diserahkan kepada tenaga kerja migran. Hal ini dikarenakan dalam melakukan perikatan apapun, pasti ada suatu perjanjian, termasuk dalam kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun karet.

Kemudian untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL IV. 4

**JAWABAN RESPONDEN TENTANG BENTUK PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
TENAGA KERJA MIGRAN
DENGAN PEMILIK KEBUN**

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A	Lisan	50	100 %
B	Tulisan	-	-
	JUMLAH	50	100 %

Sumber Data : *Olahan Angket*

Dari tabel di atas, ada 50 atau (100 %) responden yang menyebutkan perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan. Hal ini disebabkan karena mereka memakai sistem kepercayaan.

Mengenai batas waktu dalam pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja imigran dengan pemilik kebun, tidak ditentukannya batas waktunya. Akan tetapi pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya kepada tenaga kerja migran sebagai petani karet sesuai dengan kemampuannya, yakni kerjasama yang dibuat tidak mempunyai batas waktu tertentu. Untuk mengetahui tentang penentuan batas waktu dalam kerjasama tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL IV. 5

**PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PENENTUAN BATAS
WAKTU DALAM KERJASAMA**

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A	Ya	-	-

B	Tidak	32	64 %
C	Kadang-kadang	18	36 %
	JUMLAH	50	100 %

Sumber Data : *Olahan Angket*

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada responden yang mengatakan bahwa dalam kerjasama tersebut ditentukan batas waktunya Umumnya 32 atau (64%) responden yang mengatakan dalam perjanjian kerjasama yang mereka lakukan tersebut tidak ditentukan batas waktunya. Hal ini disebabkan pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada tenaga kerja migran sesuai dengan kesanggupannya, apabila tenaga kerja tidak mampu lagi menggarap, maka pihak tenaga kerja dapat menyerahkan kembali kebun karet tersebut kepada pemiliknya. Bagi pemilik kebun, dapat mengambil kebunnya kapan saja dia memerlukannya¹. Kasus ini bisa dilihat dari pemilik kebun karet yang bernama Ina, menyerahkan kebunnya untuk digarap kepada tenaga kerja migran yang bernama Abadi. Dan pemilik kebun yang bernama Ina, mengambil kebunnya yang masih digarap oleh tenaga kerja yang bernama Abadi tersebut untuk diserahkan lagi ketenaga kerja lain yang bernama jalu.

Kemudian ada 18 orang atau (36%) responden yang mengatakan dalam perjanjian kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun tersebut, kadang-kadang ditentukan batas waktunya. Misalnya, apabila pada masanya pemilik kebun ingin mengambil kebunnya untuk diserahkan jika pemilik kebun sewaktu-waktu ingin mengerjakannya sendiri². Dengan adanya perjanjian ini menjadi jaminan terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja migran maupu pemilik kebun. Karena dalam perjanjian kerjasama ini, ditentukan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.

¹ Abadi (tenaga kerja migran), *Wawancara*, Muara Lembu.

² Anang (tenaga kerja migran), *Wawancara*, Muara Lembu, 28 September 2010.

Didalam pembagian laba mereka memakai sistem bagi hasil. Keuntungan yang diperoleh adalah bagian dari hasil kebun karet yang digarap, secara ukuran persentase bukan dengan kadar yang pasti ditentukan. Dalam kerjasama ini masing-masing mendapat setengah($\frac{1}{2}$) bagian setelah dihitung dengan harga karet yang berlaku pada saat itu, dengan jumlah bersih yang dikurangi dengan jumlah kotor³.

TABEL IV. 6

**JAWABAN RESPONDEN TENTANG SISTEM YANG DIPAKAI
DALAM PEMBAGIAN LABA PADA KERJASAMA ANTARA
TENAGA KERJA MIGRAN DENGAN PEMILIK KEBUN**

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A	Upah	7	14 %
B	Bagi Hasil	43	86 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber Data : *Olahan Angket*

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa 7 atau (14%) responden yang mengatakan bahwa pembagian laba dalam pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun karet memakai sistem upah. Hal ini disebabkan karena ada beberapa pemilik kebun yang menyerahkan kebunnya hanya pada waktu tertentu saja yakni pada waktu pengambilan hasil getah yang telah di kumpulkannya⁴. Kemudian 43 atau (86 %) responden yang mengatakan pembagian laba memakai sistem bagi hasil. Sistem ini lebih adil, karena kedua belah pihak masing-masing mendapat bagian yang sama. Sistem ini telah berlaku sejak lama dalam kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemiik kebun karet di desa Muara Lembu kecamatan Singingi.

³ Iman (pemilik kebun karet), *Wawancara*, Muara Lembu, 30 September 2010.

⁴ Titin (pemilik kebun), *Wawancara*, Muara Lembu, 30 September 2010.

Selain itu, untuk mengetahui jumlah kebun karet yang digarap oleh tenaga kerja migran di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL IV. 7

JAWABAN TENAGA KERJA MIGRAN TENTANG JUMLAH KEBUN YANG DIGARAP RESPONDEN DI DESA MUARA LEMBU KECAMATAN SINGINGI

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A	1-4 hektar	5	25 %
B	4-8 hektar	12	60 %
C	Lebihdari 8 kebun	3	15 %
	JUMLAH	20	100 %

Sumber Data : *Olahan Angket*

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa 5 atau (25%) responden yang menggarap kebun 1-4 hektar. Ada 12 atau (60%) responden yang menggarap kebun 4-8 hektar serta 3 atau (15%) responden yang menggarap lebih dari 8 kebun.

Dari setiap hektar, biasanya getah karet yang dihasilkan dalam setiap minggu dengan perhitungan dalam 5 hari, mulai dari hari Sabtu hingga Minggu dan kamis biasanya penjualan getah karet melalui toke atau langsung menjualnya ke pabrik karet, karena getah karet biasanya dijual sehari sebelum hari pasar yakni pada hari jum'at. Sehingga dalam perhitungan bagi hasil biasanya ditulis hanya berbentuk kertas kecil yang didalamnya tertulis nama pemilik kebun, dan sejumlah perhitungan hasil penjualan getah karet. Dan setelah itu barulah tenaga kerja menyerahkan bukti perhitungan tersebut kepada pemilik kebun, dan pemilik kebunlah yang akan membaginya sesuai kesepakatan yakni masing-masing mendapatkan setengah dari hasil kebun⁵.

⁵ Idah (tenaga kerja migran), *Wawancara*, Muara Lembu, 1 Oktober 2010.

Selanjutnya untuk mengetahui bahwa dari sekian banyak kebun karet yang digarap oleh tenaga kerja migran, apakah dikerjaka sendiri, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL IV. 8
JAWABAN TENAGA KERJA MIGRAN TENTANG KEBUN KARET YANG
DIGARAPNYA, APAKAH DIKERJAKAN SENDIRI

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A	Iya, dikerjakan sendiri.	12	60 %
B	Dikerjakan bersama-sama dengan tenaga kerja lain	5	25 %
C	Diserahkan kepada tenaga kerja lain.	3	15 %
	JUMLAH	20	100 %

Sumber Data : *Olahan Angket*

Dari tabel di atas, dapat dilihat 12 atau (60%) tenaga kerja migran mengatakan kebun yang digarapnya dikerjakan sendiri. Hal ini disebabkan jumlah kebun yang digarap tidak begitu banyak, jika memakai tenaga kerja lain tentu keuntungan ataupun pendapatannya jadi berkurang⁶. Kemudian 5 atau (25%) tenaga kerja menggarap kebun yang digarap sangat banyak, jika dikerjakan sendiri tentu membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak⁷.

Selanjutnya ada 3 atau (15%) tenaga kerja migran mengatakan kebun yang digarapnya, diserahkan seluruhnya kepada tenaga kerja yang lain. Hal ini disesabkan,

⁶ Meri (tenaga kerja migran), Wawancara, Muara Lembu, 1 Oktober 2010.

⁷ Yani (tenaga kerja migran), *Wawancara*, Muara Lembu, 2 Oktober 2010.

karena tenaga kerja tersebut tidak sanggup untuk menggarapnya lagi sehingga penggarap menyerahkan kebun tersebut kepada orang terdekatnya untuk dilanjutkan dalam pengerjaannya⁸.

Selanjutnya untuk mengetahui prosedur pelaksanaan kerjasama tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL IV. 9

JAWABAN RESPONDEN TENTANG PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA TENAGA KERJA MIGRAN DENGAN PEMILIK KEBUN DI DESA MUARA LEMBU

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A	Pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada tenaga kerja migran untuk digarap dan imbalan di ambil dari hasil kebun. Dan pembagiannya 1/3 dari hasil kebun.	6	12%
B	Pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada penggarap tanpa imbalan apapun bagi pemilik kebun.	0	0 %
C	Pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada tenaga kerja migran untuk digarap dan mendapat bagi hasil ½ dari hasil kebun.	44	88%
	JUMLAH	50	100%

Sumber Data : *Olahan Angket*

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa 6 atau (12%) responden mengatakan bahwa prosedur dalam kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun adalah pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada tenaga kerja migran untuk digarap dan imbalan diambil 1/3 dari hasil kebun. Hal ini disebabkan karena mereka telah sepakat menerapkan cara kerjasama seperti itu⁹. Dan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tidak ada responden yang mnyerahkan kebunnya kepada penggarap tanpa ada imbalan apapun bagi pemilik kebun. Kemudian 44 atau (88%) responden yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan

⁸ Tomi (pemilik kebun), *Wawancara*, Muara Lembu, 2 Oktober 2010.

⁹ Leni (pemilik kebun), *Wawancara*, Muara Lembu, 4 Oktober 2010.

kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun, adalah pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada tenaga kerja migran untuk digarap, dan mendapatkan bagi hasil yakni $\frac{1}{2}$ dari hasil kebun. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat Muara Lembu menerapkan pelaksanaan kerjasama seperti ini¹⁰.

Selain itu, untuk mengetahui pendapat responden tentang perlukah mereka kalau dalam perjanjian kerjasama dibuat secara tertulis, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL IV. 10

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PERLUNYA, JIKA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TENAGA KERJA MIGRAN DENGAN PEMILIK KEBUN DIBUAT SECARA TERTULIS

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A	Perlu	24	48 %
B	Kurang perlu	17	34 %
C	Tidak perlu	9	18 %
	JUMLAH	50	100 %

Sumber Data : *Olahan Angket*

Dari tabel di atas, dapat dilihat ada 24 atau (48%) responden yang mengatakan perlu perjanjian dibuat secara tertulis. Hal ini disebabkan kalau perjanjian dibuat secara tertulis akan mempunyai kekuatan hukum¹¹. Kemudian 17 atau (34 %) responden yang mengatakan bahwa mereka kurang perlu kalau perjanjian dalam kerjasama dibuat secara tertulis, karena mereka menginginkan cara yang mudah dan cepat¹². Selanjutnya ada 9 atau (18%) responden yang mengatakan tidak perlu kalau perjanjian kerjasama dibuat secara tertulis. Hal ini disebabkan, karena kedua belah pihak sudah kenal dan saling percaya¹³.

¹⁰ Fardi (pemilik kebun), *Wawancara*, Muara Lembu, 4 Oktober 2010.

¹¹ Iwin (Pemilik kebun), *Wawancara*, Muara Lembu, 5 Oktober 2010.

¹² Ujang (tenaga kerja migran), *Wawancara*, Muara Lembu, 5 Oktober 2010.

¹³ Siam (tenaga kerja migran), *Wawancara*, Muara Lembu, 5 Oktober 2010.

Selain itu pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun, dalam mengetahui pernahkah terjadi penyimpangan dalam kerjasama dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL IV. 11
JAWABAN PEMILIK KEBUN TENTANG TERJADI PENYIMPANGAN SELAMA
KERJASAMA

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A	Pernah	8	26,7 %
B	Tidak pernah	10	33,3 %
C	Kadang-kadang	12	40 %
	JUMLAH	30	100 %

Sumber Data : *Olahan Angket*

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa 8 atau (26,7%) pemilik kebun yang mengatakan pernah terjadi penyimpangan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kejujuran dari pihak tenaga kerja migran, sehingga mempengaruhi pembagian hasil, karena pemilik kebun mendapat bagian kurang dari semestinya ia dapat¹⁴.

Kasus ini bisa dilihat dari pemilik kebun yang bernama Iman, ia menyerahkan kebunnya kepada tenaga kerja migran yang bernama Iyan. Pada saat getah karet yang dihasilkan itu sudah terkumpul, si Iyan menyembunyikan setengah dari getah yang dikumpulkan kemudian setengahnya lagi baru ia jual. dan hasil penjualan dari getah setengah inilah yang ia serahkan kepada pemilik kebun untuk dibagi hasil. Maka keuntungan tidak sesuai dengan apa yang semestinya dia dapatkan¹⁵.

Kemuudian 10 atau (33,3%) pemilik kebun yang mengatakan tidak pernah terjadi penyimpangan selama kebun tersebut berada dipihak tenaga kerja. Selanjutnya 12

¹⁴ Iman (pemilik kebun), *Wawancara*, Muara Lembu, 5 Oktober 2010.

¹⁵ *Ibid.*

atau (40%) pemilik kebun yang mengatakan dalam kerjasama tersebut, kadang-kadang pernah terjadi penyimpangan. Kasus ini bisa dilihat dari tenaga kerja migran yang bernama Idep, melakukan pemalsuan bukti perhitungan hasil penjualan kebun dari toke (pembeli karet) dengan mengganti kertasnya dengan menulis kembali dengan catatan hasil yang salah¹⁶.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana penyelesaian jika terjadi penyimpangan terhadap kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL IV. 12

**JAWABAN PEMILIK KEBUN TENTANG PENYELESAIAN TERHADAP
PENYIMPANGAN YANG DILAKUKAN TENAGA KERJA MIGRAN**

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A	Pemilik kebun memberi peringatan kepada tenaga kerja migran.	11	36,7 %
B	Pemilik kebun mengambil kembali kebunnya dan menyerahkan kepada yang lain yang mempunyai sifat amanah.	19	63,3%
	JUMLAH	30	100 %

Sumber Data : *Olahan Angket*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 11 atau (36,7%) pemilik kebun yang mengatakan bahwa jika terjadi penyimpangan dalam perjanjian maka dia akan memberikan peringatan terhadap tenaga kerja migran agar tidak mengulanginya lagi¹⁷. Kemudian 19 atau (63,3%) pemilik kebun yang mengatakan bahwa ia akan mengambil kebunnya dari tenaga kerja migran dan menyerahkannya kepada tenaga kerja lain, apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan tenaga kerja dalam kerjasama tersebut¹⁸.

¹⁶ Pikal (pemilik kebun), *Wawancara*, Muara Lembu, 5 Oktober 2010.

¹⁷ Farida (pemilik kebun), *Wawancara*, Muara Lembu, 20 Oktober 2010.

¹⁸ Abas (pemilik kebun), *Wawancara*, Muara Lembu, 20 Oktober 2010.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun karet sudah sesuai dengan kesepakatan, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL IV. 13
JAWABAN RESPONDEN TENTANG KERJASAMA SESUAI
DENGAN KESEPAKATAN

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A	Sesuai	16	32 %
B	Kurang sesuai	24	48 %
C	Tidak sesuai	10	20 %
	JUMLAH	50	100 %

Sumbar Data : *Olahan Angket*

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa 16 atau (32%) responden yang mengatakan bahwa kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun sudah sesuai dengan perjanjian. Hal ini disebabkan tidak ada selisih paham ataupun kecurangan dalam kerjasama tersebut, karena adanya keterbukaan dari kedua belah pihak selama kerjasama berlangsung¹⁹.

Kemudian 24 atau (20%) responden yang mengatakan bahwa kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun kurang sesuai dengan kesepakatan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan dengan tidak adanya batas waktu, bisa saja tenaga kerja migran merasa dirugikan karena pemilik kebun bisa mengambil kebunnya kapanpun dia mau²⁰.

Selanjutnya ada 10 atau (20%) responden yang mengatakan bahwa kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun tidak sesuai dengan perjanjian. Hal ini

¹⁹ Pika (pemilik kebun), *Wawancara*, Muara Lembu, 24 Oktober 2010.

²⁰ Ilet (tenaga kerja migran), *Wawancara*, Muara Lembu, 24 Oktober 2010.

disebabkan arena ada tenaga kerja migran yang menyimpang dari kesepakatan dalam kerjasama, seperti tidak amanah dalam pembagian hasil²¹.

Untuk mengetahui dalam berakhirnya suatu kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun karet, apakah dalam kerjasama itu ada pembatalan kerjasama itu secara sepihak, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL IV. 14
JAWABAN RESPONDEN TENTANG PEMBATALAN SEPIHAK
DALAM KERJASAMA

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A	Ada	8	16 %
B	Tidak	42	84 %
	JUMLAH	50	100 %

Sumber Data : *Olahan Angket*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun terdapat 8 atau (16%) responden yang menjawab ada yang membatalkan kerjasama secara sepihak, disebabkan karena kecurangan ataupun ketidak sanggupan tenaga kerja dalam menggarap kebun, maupun ketidak cocokan bagi pemilik kebun itu sendiri²².

Kemudian 42 atau (84%) responden yang mengatakan bahwa tidak ada yang membatalkan pelaksanaan kerjasama tersebut secara sepihak. Dan apabila diantara kedua belah pihak itu sudah tidak ingin lagi melaksanakan kerjasama, maka pihak tersebut berhak meminta persetujuan dari pihak yang melaksanakan kerjasama tersebut.

B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Antara Tenaga Kerja migran Dengan Pemilik Kebun Di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi.

²¹ Sieng (pemilik kebun), *Wawancara*, Muara Lembu, 24 Oktober 2010.

²² Fai (tenaga kerja migran), *Wawancara*, Muara Lembu, 28 Oktober 2010.

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi Islam memiliki sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadits, serta dilengkapi dengan ijma' dan qiyas. Sistem ekonomi Islam saat ini dikenal dengan istilah sistem ekonomi syari'ah. Kaedah hukum asal syari'ah yang berlaku dalam urusan muamalah adalah bahwa semuanya dibolehkan kecuali ada ketentuan Al-qur'an dan Hadits yang melarangnya.

Sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

مادل الدليل خلافه

Artinya: Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang bertentangan dengannya (yang melarangnya)".

Jadi muamalah yang diperintahkan oleh syara' untuk dikerjakan hendaklah dikerjakan dan jika dilarang mengerjaakan hendaklah ditinggalkan.

Pengertian kerja dalam ekonomi Islam mencakup semua pekerjaan fisik. Hal ini berbeda dengan pekerjaan dalam ekonomi konvensional yang hanya menghasilkan barang dan jasa dan untuk mendapatkan imbalan tertentu dari suatu pekerjaan²³.

Setiap pekerja muslim, hendaknya mempunyai sifat mulia. Dalam Islam sifat yang harus dimiliki oleh pekerja muslim yaitu diantaranya²⁴ :

a. Jujur

Allah menyuruh kita bersikap jujur dan Allah memuji sikap ini. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat At-taubah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

²³ JAWAHIR BIN AHMAD AL-HAFSI, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*, (Jakarta: Khamma, 2006).

²⁴ Abdurrahman Bin Sa'ad Adl Dlarman, *Fiqh Kerja*, (Rembang: Pustaka Anisah, 2005), h. 86.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”²⁵.

b. Amanat

Sifat ini merupakan budi pekerti mulia yang menyebabkan pelakunya menjaga baik-baik setiap amanat. Dikatakan amanat adalah titipan yang diserahkan kepada seseorang dan ia diminta untuk menjaga titipan itu baik-baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Annisa’ ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu apabila sesuatu titipan diserahkan kepada orang-orang, supaya kamu tegak kepada yang berhak menerimanya”²⁶.

c. Budi pekerti yang mulia

Budi pekerti yang mulia merupakan sifat para Nabi dan Rasul. Budi pekerti dapat berubah dan terbentuk menurut kondisi dan masyarakatnya. yang dimaksud budi pekerti yang mulia adalah budi pekerti yang wajar disegala bidang, tidak pernah lebih dan tidak pernah kurang. Kewajaran budi pekerti seseorang, adakalanya didapat dari kesempurnaan fitrahnya sejak lahir, adakalanya pula diperoleh dari pengaruh pekerjaan sehari-hari.

d. Bersabar

Taufik yang terbaik dan tanda-tanda kebahagiaan adalah bersabar ketika mengalami kesulitan.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia Al-qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Karya Insani Indonesia, 2002), Cet Ke-4.

²⁶ *Ibid.*

e. Menepati janji

Menepati janji merupakan budi pekerti mulia yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Mukminun ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”²⁷.

Seseorang pekerja muslim hendaknya memberi segala sesuatu menurut haknya.

f. Bersikap adil

Bersikap adil adalah meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya, atau membagi sesuatu sesuai dengan bagiannya masing-masing tanpa mengurangi atau menambah. Islam mempunyai nilai-nilai yang mengatur umatnya untuk tetap berada dalam ajaran yang murni.

Secara umum kerjasama adalah sesuatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan sebagaimana dinyatakan dalam Alqur'an Surat Al- Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

²⁷ Ibid.

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya²⁸.

Kerjasama dapat berlaku dalam usaha pertanian atau perkebunan, peternakan dan dapat pula dalam usaha perdagangan dan industri²⁹. Kerjasama dalam bidang pertanian dapat berlaku antara pemilik kebun dengan pekerja yang disebut dengan musaqah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data, baik berbentuk angket, wawancara, dan observasi penulis berpendapat bahwa pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun pada masyarakat Muara Lembu Kecamatan Singingi menimbulkan *gharar* (kesamaran). Peranjan merupakan bagian dari muamalah. Syari'at Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam kerjasama. Bebas disini ialah dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan secara mapan yang telah diberikan suatu patokan-patokan hukum dan tidak saling merugikan disalah satu pihak maupun diantara pihak lain.

Dalam bentuk kerjasama dibidang perkebunan, dalam Islam disebut juga dengan sistem musaqah. Begitu juga dalam hal perjanjian bagi hasil, dimana perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut dengan penggarap. Dan berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk ,menggarap kebun dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak³⁰.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003). Ed.1, Cet Ke-2.

³⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 32.

Secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu perjanjian adalah³¹:

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak Itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syaria'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut.

2. Harus sama ridha dan ada pilihan.

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kepada kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

3. Harus jelas dan gamblang.

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak tentang apa yang telah diperjanjikan dikemudian hari.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Ai-Ma'arif, 1998), jilid 12, 13, 14, h. 178-179.

Gambaran dari pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi, menunjukkan adanya unsur *gharar*, dikarenakan tidak mencermati apa yang telah ditentukan oleh syari'ah Islam. Bentuk *gharar* yang dilakukan pemilik kebun dan tenaga kerja migran ini adalah:

- a) Perjanjian kerjasama dibuat tidak tertulis, akibatnya terjadi penyimpangan seperti penggarap tidak amanah dalam pembagian hasil dan penggarap menyerahkan kebun yang telah dipercayakan pemilik kepadanya, dan ia meyerahkan lagi kepada tenaga kerja lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun.
- b) Tidak ada batas waktu dalam pelaksanaan kerjasama, akibatnya pemilik kebun dapat mengambil kebunnya kapanpun dia suka.

Islam memandang sangat penting menjaga hubungan muamalah karena dengan muamalah yang benar akan menciptakan hubungan keharmonisan antara sesama muslim, didalam Islam pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan. Yang didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: “ Dialah yang telah menciptakan apa yang ada di bumi ini untuk kamu sekalian”³².

Jadi idealnya pelaksanaan kerjasama dalam Islam seperti:

1. Perjanjian hendaklah dilakukan tertulis.
2. Transparansi dalam pembagian hasil.
3. Kerjasama harus didasarkan adanya manfaat dan menghindari diri dari timbulnya kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.

³² Depag RI. *Op. cit.*,

Adanya jaminan dan syarat-syarat yang disebutkan diatas, maka dalam pelaksanaan kerjasama antara pemilik kebun dengan tenaga kerja tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

Adanya penyimpangan berarti tidak mematuhi kesepakatan dalam akad kerjasama. Sedangkan dalam Al-qur'an dijelaskan supaya kita menempati janji, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al- Maidah ayat 1 :

Artinya: “Hai oran³³ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Allah menganjurkan kepada hambanya untuk saling tolong-menolong bukan saling mengambil kesempatan dalam kesempitan atau penderitaan orang lain.

Kemudian dengan memperhatikan tentang pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun yaitu dilakukan secara tidak tertulis atau lisan. Sedangkan didalam Al-qur'an Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apabila melaksanakan muamalah hendaknya ditulis, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِذَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ³⁴ ak secara tunai dalam waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menulisnya”³⁴.

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, apabila setiap kali mengadakan perjanjian baik dalam pelaksanaan kerjasama tidak secara tunai supaya melengkapi dengan alat bukti dasar untuk menyelesaikan persengketaan

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

yang kemungkinan terjadi di kemudian hari. Dalam Al-qur'an Surat Ali Imran ayat 76 yang berbunyi:

Artinya; “ (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”³⁵.

Islam membenarkan adanya kerjasama dan memerintahkan agar saling tolong-menolong antar sesama manusia dan tidak merugikan antar sesama.

³⁵ *Ibid.*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari semua pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama: pelaksanaan perjanjian kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun karet di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi, yakni bentuk perjanjiannya tidak tertulis. Pembagian laba dalam kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun memakai sistem bagi hasil. Dan dalam pembagian hasil, masing-masing mendapatkan ($\frac{1}{2}$) bagian dari hasil penjualan getah karet. Pemilik kebun di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi cenderung kurang pengawasan dalam mempekerjakan tenaga kerja migran. Sehingga pada pihak tenaga kerja banyak yang menyimpang dari perjanjian kerjasama ini. Bagi tenaga kerja migran yang tidak mempunyai sifat amanah, memanfaatkan kesempatan tersebut dalam pengambilan keuntungan sendiri, yakni dengan melakukan berbagai macam kecurangan baik dari segi penyadapan karet maupun dari segi bagi hasil kebun. Hal ini juga disebabkan karena dalam kerjasama ini pihak tenaga kerja berasal dari luar daerah, dan tidak ada batas waktu dalam pelaksanaan kerjasama ini. Sehingga bagi pihak tenaga kerja migran yang tidak amanah hal ini memudahkan pihak tenaga kerja tersebut pulang ke daerah asalnya dengan membatalkan kerjasama secara sepihak tanpa sepengetahuan pemilik kebun yang menyebabkan kerugian bagi pemilik kebun.

Kedua: Pandangan ekonomi Islam tentang pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi, tidak sesuai

denagan syari'at Islam. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya menimbulkan unsur *gharar* (kesamaran), akibatnya terjadi penyimpangan dalam kerjasama. Bagi pihak tenaga kerja migran yang tidak memiliki sifat amanah, baik dalam proses penyadapan maupun dalam pembagian dari penjualan hasil kebun, sehingga pemilik kebun merasa dirugikan karena tidak mendapatkan bagian keuntungan sebagaimana mesti yang ia dapatkan. Kemudian dalam pelaksanaan kerjasama ini pemilik kebun menyerahkan kebun sepenuhnya kepada tenaga kerja migran sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi tenaga kerja tersebut menyerahkan lagi kebun yang telah diamanatkan oleh pemilik kebun itu kepada tenaga kerja lain tanpa sepengetahuan pemlik kebun. Begitu juga dalam bentuk kerjasamanya dibuat tidak tertulis. Akibatnya pemilik kebun juga dapat mengambil kebunnya kapanpun dia suka. Islam sangat menganjurkan apabila mengadakan muamalah, hendaklah dilakukan tertulis dan dilengkapi dengan alat bukti dasar untuk mempermudah dalam menyelesaikan persengketaan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari. Islam membenarkan adanya kerjasama dan memerintahkan agar saling tolong-menolong antar sesama manusia. Sehingga semua bentuk kerjasama yang dilakukan haruslah jelas, agar masing-masing pihak tidak merasa dirugikan.

B. SARAN

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kesalahan, hal tersebut dikarenakan kemampuan penulis yang sangat terbatas. Baik itu masalah pengalaman maupun pengetahuan. Oleh karena itu

penulis mengharapkan kepada pembaca agar dapat kiranya lebih menyempurnakan kekurangan dalam penulisan berikutnya dalam karya ilmiah.

Adapun saran-saran penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pemilik kebun, sebelum mempekerjakan tenaga kerja migran hendaklah melakukan pengawasan terlebih dahulu.
2. Hendaklah dalam suatu perjanjian kerjasama dilakukan secara tertulis. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari, maka dapat terselesaikan dengan adanya bukti yang jelas.
3. Hendaknya ada batas waktu yang jelas dalam kerjasama, Sehingga tidak ada unsur *gharar* (kesamaran). Yang dapat menimbulkan banyak penyimpangan dalam pelaksanaan kerjasama.
4. Sebagai tenaga kerja dalam menggarap kebun karet, hendaklah memiliki sifat amanah, jujur, mempunyai budi pekerti yang mulia, bersabar, menepati janji serta bersikap adil. Agar hasil dari usaha yang di dapatkan itu mendapat Ridho dari Allah SWT.

Oleh sebab itu perjanjian dalam kerjasama hendaklah di buat tertulis, agar dalam pelaksanaannya tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat kecurangan maupun penipuan dari masing-masing pihak yang melakukan akad dalam kerjasama. Sebelum melakukan kerjasama hendaklah dibuat surat perjanjiannya. Penulis menyarankan dalam kerjasama antara kedua belah pihak harus disertai dengan bukti yang jelas, yang dibuat dalam bentuk surat perjanjian kerjasama. Dalam hal ini penulis menyarankan contoh surat perjanjian kerjasama yang penulis lampirkan sebagai berikut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2004).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006).
- Al-albani, M. Nashiruddin, *Kitab Al-Musaqah Ringkasan Sahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani, 2007).
- Abdurrahman Bin Sa'ad Adl Dlarman, *Fiqih Kerja*, (Rembang: Pustaka Anisah, 2005).
- Barthos Basir , *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995).
- Chairuman Pasaribu, H. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Karya Insani Indonesia, 2002).
- Everetss Lee, *Suatu Teori Migrasi, Terj.* (Yogyakarta: Lembaga Kependudukan UGM, 1976).
- Ima Kesuma, Andi, *Migrasi dan Orang Bugis*, (Yogyakarta: Ombak, 2004
- Jabir Al-Jazi'ri, Syaikh Abu Bakar, *Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq
- Karim Adiwarmarman,Ir. *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007).
- Pollard, Farhap Yusuf, *Teknik Demokrasi*, (Jakarta : Bina Aksara, 1989).
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 1995).
- Rodli Hasbullah, Ahmad, Muadjab Mahalli Ahmad, *Hadis-hadis Muttafaq'Alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. Ke-1, h.103.

Suhendi Hendi, H. Dr. M.Si, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007).

Sumarsono Sonny, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2003).

Siswono Yudhohusodo, *Transmigrasi*, (Jakarta : PT. Jurnalindo Aksara Grafika, Grafindo Persada, 1998).

Suerjono Soekonto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Wali Press, 1986).

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003).

Tasmara, Toto, KH. *Membudayakan Etos Kerja Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2004).

Warsito Rukmadi, dkk, *Transmigrasi Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1995).

Zaky Al Kaaf Abdullah, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2002).

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel II .I : Klasifikasi penduduk menurut jenis kelamin	13
2. Tabel II .2 : Klasifikasi perkembangan jumlah kepala keluarga	14
3. Tabel II .3 : Jumlah sarana pendidikan di desa Muara lembu Kecamatan Singingi.....	15
4. Tabel II .4 : Jumlah tempat ibadah di desa Muara lembu	16
5. Tabel II . 5: Perbandingan jumlah penduduk menurut mata pencaharian	18
6. Tabel II .6 : Jumlah penduduk migran di desa Muara Lembu	33
7. Tabel II .7 : Klasifikasi jumlah tenaga kerja migran di desa Muara Lembu	34
8. Tabel IV.1 : Jumlah kebun karet yang dimiliki oleh pemilik kebun Di desa Muara Lembu	37
9. Tabel IV.2: Pengawasan dalam penentuan untuk mempekerjakan tenaga kerja Migran	38
10. Tabel IV.3 : pembuatan kesepakatan sebelum kebun berada dipihak Tenaga kerja migran	38
11. Tabel IV.4 : bentuk perjanjian kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun	39
12. Tabel IV.5 : penentuan batas waktu dalam kerjasama	40
13. Tabel IV.6 : Sistem yang dipakai dalam pembagian laba	41

14. Tabel IV.7 : Jumlah kebun yang digarap tenaga kerja migrant	42
15. Tabel IV.8 : Penggarapan kebun karet oleh tenaga kerja migran apakah dikerjakan Sendiri	44
16. Tabel IV.9 : Pelaksanaan kerjasama antara tenagakerja migrant dengan Pemilik kebun	45
17. Tabel IV.10: Perlunya dalam perjanjian kerjasama dibuat tertulis..	46
18. Tabel IV.11 : Terjadinya penyimpangan selama kerjasama	47
19. Tabel IV.12 : Penyelesaian terhadap penyimpangan	48
20. Tabel IV.13 : Kerjasama sesuai dengan kesepakatan	49
21. Tabel IV 14 : Pembatalan sepihak dalam kerjasama	50

PEDOMAN WAWANCARA

- 1) Bagaimana pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun di desa Muara Lembu ?
- 2) Apakah pemilik kebun mengenal lebih jauh tenaga kerja terlebih dahulu sebelum memberikan kebunnya untuk di kerjakan ?
- 3) Bagaimana proses dalam penggarapan kebun karet, selama kebun berada pada pihak pekerja ?
- 4) Bagaimana pembagian hasil antara pemilik kebun karet dengan tenaga kerja migran ?
- 5) Kenapa perjanjian kerjasama antara pemilik kebun karet dengan tenaga kerjanya di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi tidak dilakukan tertulis ?
- 6) Apa saja penyimpangan yang terjadi dalam kerjasama antara pemilik kebun karet dengan tenaga kerja migran ?

ANGKET

Pertanyaan yang diajukan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang : “PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA TENAGA KERJA MIGRAN DENGAN PEMILIK KEBUN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”. (STUDI KASUS PADA PETANI KARET DI DESA MUARALEMBU KECAMATAN SINGINGI).

Ketentuan pengisian

- 1) Isilah kuisioner berikut ini dengan salah satu jawaban yang Bapak/ Ibu / Sdr/ I anggap penting
- 2) Kuisioner ini digunakan untuk kepentingan penyelesaian skripsi, karena itu jawaban bapak / ibu /sdr/ I sangat diharapkan/
- 3) Identitas Bapak/ Ibu Sdr/ I akan terjaga kerahasiaannya

Identitas responden :

Nama :

Pendidikan :

Pertanyaan:

1. Apakah Bapak/ Ibu/ Sdr/I melakukan suatu pengawasan terlebih dahulu sebelum perjanjian kerjasama itu dilaksanakan?
A. Ya B. Kurang C. Tidak
2. Sebelum lahan berada dipihak pekerja, apakah Bapak/ Ibu / Sdr/ I membuat kesepakatan?
A. Ya B. Tidak C. Kadang-kadang
3. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama bagaimana bentuk perjanjian yang Bapak/ Ibu/ Sdr/ I lakukan?
A. Lisan B. tertulis
4. Sebelum kebun diserahkan kepada tenaga kerja, apakah Bapak / Ibu/ Sdr / I menentukan batas waktunya?
A. Ya B. Kadang-kadang C. Tidak

5. Dalam kerjasama dengan pemilik kebun dan tenaga kerja migran, dalam pembagian hasil dengan sistem apa ?
 - A. Bagi hasil B. Upah
6. Bila Bapak/ Ibu/ Sdr/ I sebagai pemilik kebun, berapakah jumlah lahan yang Bapak/ Sdr/ I miliki ?
 - A. 1-4 hektar B. 4-8 hektar C. lebih dari 8 hektar
7. Kebun yang digarap oleh tenaga kerja biasanya berapa hektar ?
 - A. 1-4 hektar B. 4-8 hektar C. Lebih dari 8 lahan
8. Dari sekian banyak kebun yang digarap, apakah Bapak/ Ibu/ Sdr/ I kerjakan sendiri?
 - A. Iya, dikerjakan sendiri B. Dikerjakan bersama-sama dengan petani lain
 - C. Diserahkan kepada penggarap
9. Bagaimana prosedur pelaksanaan kerjasama yang Bapak/ Ibu/ Sdr/ I terapkan?
 - A. Pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada penggarap dengan imbalan dari hasil kebun.
 - B. Pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada penggarap tanpa imbalan apapun bagi pemilik kebun
 - C. Pemilik kebun menyerahkan kebun kepada penggarap dan mendapatkan uang sewa
10. Apakah Bapak/ Ibu/ Sdr/ I merasa perlu jika perjanjian kerjasama antara pemilik kebun karet dengan pekerja dibuat secara tertulis?
 - A. Perlu B. Kurang perlu C. Tidak perlu
11. Selama kebun karet Bapak/ Ibu/ Sdr/ I digarap oleh tenaga kerja migran, pernahkah terjadi penyimpangan ?
 - A. Pernah B. Tidak pernah C. Kadang-kadang
12. Apabila terjadi penyimpangan dari tenaga kerja migran, bagaimana Bapak/ Ibu/ Sdr/ I menyelesaikannya ?
 - A. Pemilik kebun memberi peringatan kepada penggarap
 - B. Pemilik kebun mengambil kembali kebunnya dan menyerahkan kepada yang lain yang amanah.

13. Menurut Bapak/ Ibu/ Sdr/ I apakah kerjasama antara kedua belah pihak sudah sesuai dengan kesepakatan ?

A. Sesuai B. Kurang sesuai C. Tidak sesuai

14. Jika masih dalam batas waktu perjanjian kerjasama, adakah pihak pemilik kebun karet ataupun pihak tenaga kerja migran membatalkan perjanjian kerjasama itu secara sepihak?

A. Ada B. Tidak

AUTOBIOGRAFI PENULIS



Nurrezki Efnita adalah nama yang diberikan orang tua penulis pada saat penulis di lahirkan pada tanggal 2 Januari 1988. Anak kelima dari enam bersaudara, dari pasangan Ayahanda Imran dan Rawiyah.

Pada tahun 1994 penulis mengawali pendidikan di SDN 002 Muara Lembu Kecamatan Singingi. Pada tahun 2000 penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Singingi, pada tahun 2003 melanjutkan pendidikan ke MAN 1 Teluk Kuantan dan tamat tahun 2006. Selanjutnya pada tahun 2006 tersebut penulis melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi Negeri yaitu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam. Pada tahun 2009 penulis melaksanakan **Magang (*job training*)** di Bank RIAU Teluk Kuantan selama 2 bulan. Setelah itu Penulis melaksanakan penelitian dengan judul **PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA TENAGA KERJA MIGRAN DENGAN PEMILIK KEBUN MENURUT PERSFEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Petani Karet Di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi)**

di bawah bimbingan Bapak Azwar Aziz, SH. M.Si Sehingga pada tanggal 25 Januari penulis dinyatakan lulus ujian munaqasah dan berhak menyandang gelar S.EI.